



RENCANA KERJA 2024

KECAMATAN BANGSAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	28
3.3 Program dan Kegiatan	28
BAB IV	33
BAB V PENUTUP	39
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja	39
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	39
5.3 Rencana Tindak Lanjut	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Bangsal merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Bangsal yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Bangsal adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja SKPD

Tahapan persiapan penyusunan Renja antara lain pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi.

b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD

1. Tahap perumusan rancangan Renja

Perumusan rancangan Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, telaah terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, pembahasan forum SKPD, serta penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap penyajian rancangan Renja

Penyajian rancangan Renja dapat disusun menurut sistematika yang ada.

c. Pelaksanaan forum SKPD

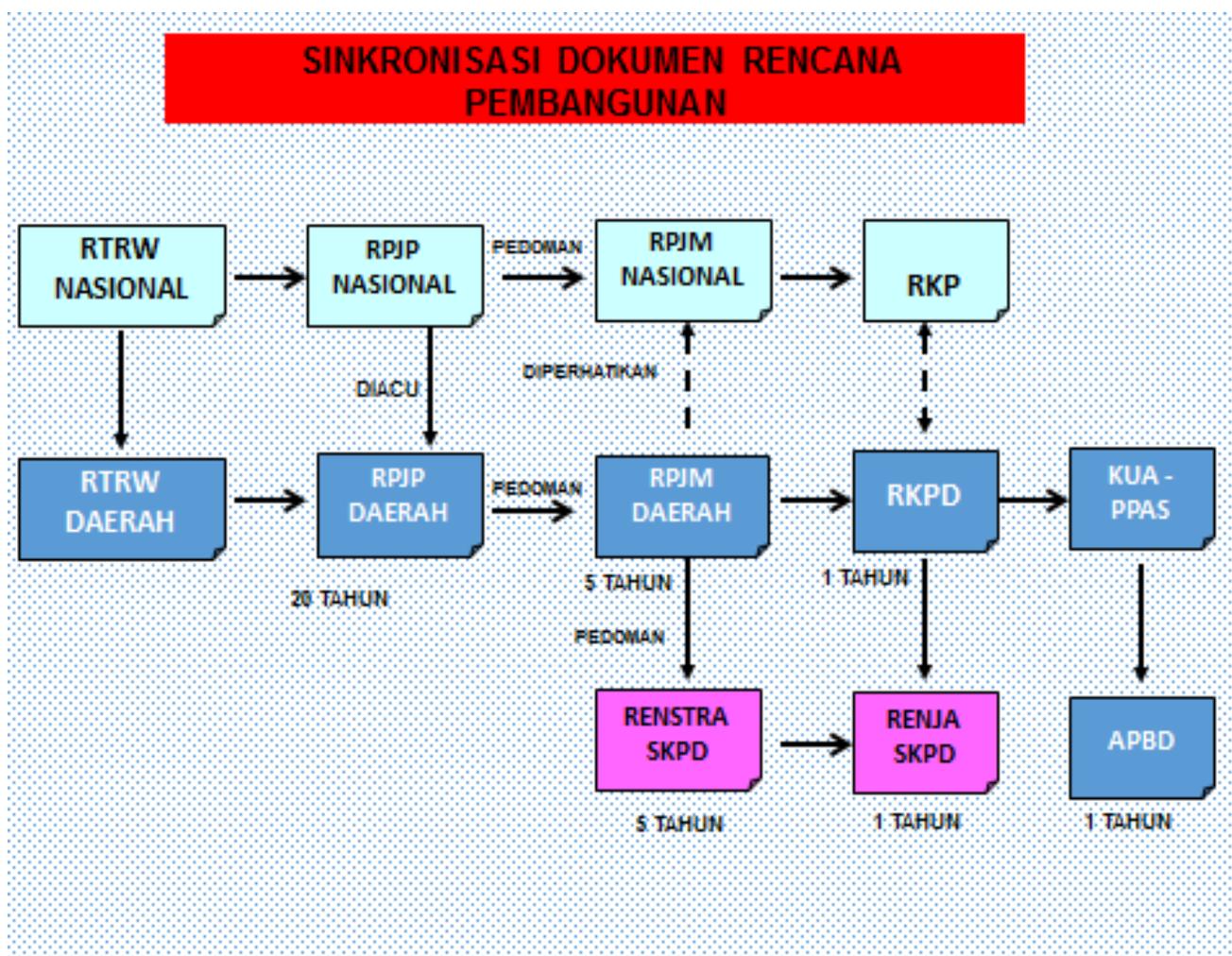
Forum SKPD merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD.

d. Penetapan Renja SKPD

Penetapan rancangan akhir Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran tersebut.

Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan Renja Provinsi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen RKPD



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Bangsal yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Bangsal.

RKPD merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Kegiatan awal penyusunan Rancangan APBD dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri setiap tahunnya. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati maka Pemerintah Daerah menyusun PPAS dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan;
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Dari KUA dan PPAS yang telah disusun akan diperoleh nota kesepakatan yang akan menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) memuat tentang aktivitas dalam penyusunan APBD. RKA-SKPD ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah sehingga sifatnya adalah usulan dengan menggunakan PPAS sebagai acuannya. Usulan-usulan ini akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya dievaluasi dan diseleksi menjadi RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto. Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
- 28) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 29) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Bangsal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Bangsal ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Kecamatan Bangsal dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsal permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Bangsal pada tahun 2023 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut ini :

**TABEL 2.1
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN KECAMATAN BANGSAL 2023**

No. Urut	Kode Rekening Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA
			(Rp)	RP	%	Rp
1	2	3	4	5	6	7
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.831.896.440,00	2.690.231.144,00	95,00%	141.665.296,00
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.000,00	13.919.900,00	96,00%	580.100,00
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.247.500,00	96,63%	252.500,00
2	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	6.672.400,00	95,32%	327.600,00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.318.905.000,00	2.203.690.161,00	95,03%	115.214.839,00
3	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.318.905.000,00	2.203.690.161,00	95,03%	115.214.839,00

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.914.000,00	172.703.950,00	93,90%	11.210.050,00
6	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	24.239.250,00	96,96%	760.750,00
7	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	12.940.000,00	99,54%	60.000,00
8	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.894.000,00	36.195.550,00	98,11%	698.450,00
9	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.422.000,00	22.819.350,00	89,76%	2.602.650,00
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000,00	3.475.000,00	99,29%	25.000,00
10	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	45.098.000,00	43.174.800,00	95,74%	1.923.200,00
11	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00	29.860.000,00	85,31%	5.140.000,00
	7.01.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.452.000,00	18.392.000,00	99,67%	60.000,00
12	7.01.01.2.08.05	Pengadaan Mebel	18.452.000,00	18.392.000,00	99,67%	60.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.813.440,00	116.929.386,00	90,07%	12.884.054,00
12	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	37.115.946,00	74,23%	12.884.054,00
13	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.813.440,00	79.813.440,00	100,00%	0,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.312.000,00	164.595.747,00	98,97%	1.716.253,00
14	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.812.000,00	51.267.920,00	98,95%	544.080,00
15	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.000.000,00	75.907.827,00	98,58%	1.092.173,00
16	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.500.000,00	37.420.000,00	99,79%	80.000,00
II	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.850.000,00	17.175.200,00	96,22%	674.800,00
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17.850.000,00	17.175.200,00	96,22%	674.800,00
18	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	17.850.000,00	17.175.200,00	96,22%	674.800,00
V	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	305.537.027,00	285.292.850,00	93,37%	20.244.177,00

	7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	305.537.027,00	285.292.850,00	93,37%	20.244.177,00
24	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	44.808.167,00	41.076.250,00	91,67%	3.731.917,00
26	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	38.325.360,00	36.425.450,00	95,04%	1.899.910,00
24	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82.000.000,00	77.476.400,00	94,48%	4.523.600,00
26	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	140.403.500,00	130.314.750,00	92,81%	10.088.750,00
		JUMLAH	3.155.283.467,00	2.992.699.194,00	94,85%	162.584.273,00

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2 (T-C.29) sebagai berikut :

TABEL 2.3 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Kewilayahan									
7,01	Kecamatan									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,25		77	78,71	102%			
7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</i>	85%		81%	81%	100%			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat Tersusun sesuai Ketentuan yang Berlaku	15 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Dapat Tersusun	35 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100%			
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</i>	85%		81%	93,88%	78%			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	140 Dokumen		14 Bulan	14 Bulan	100%			

7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>IP ASN Perangkat Daerah</i>	79,4		70	76,96	#DIV/0!			
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Stel		24 Stel	24 Stel	100%			
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Bintek			0	#DIV/0!			
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</i>	85%		81%	81%	78%			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Lampu TL, Saklar, Stopkontak, dll	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LCD, Printer, Dll	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : Kertas, Kop, Lembar Disposisi dan Fotocopy	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disesuaikan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%			
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Tinta, Ballpoint, Map Dll	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%			
7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>Prosentase Jumlah Pengadaan Kendaraan</i>	100%		100%	100%	100%			

	<i>Daerah</i>	<i>Dinas Operasional</i>								
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Kendaraan R2		10 Unit	10 Unit	100%			
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</i>	85%		81%	81%	100%			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja selama 12 bulan	3 Orang		12 Bulan	12 Bulan	100%			
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	85%		81%	81%	100%			
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang Terpelihara selama setahun	1 unit		12 Bulan	12 Bulan	100%			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 Unit		3 Unit	3 Unit	100%			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standart Pelayanan	85%		81%	96%	100%			
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Jumlah Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal</i>	5500 pelayanan		1100 pelayanan	1058 pelayanan	478%			
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	550 pelayanan		550 Pelayanan	401 Pelayanan	20%			
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	550 pelayanan		550 Pelayanan	657 Pelayanan	52%			

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	85%		81%	58%	74%			
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</i>	60 Fasilitasi		59 fasilitasi	42 fasilitasi	100%			
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 Fasilitasi		17 fasilitasi	10 fasilitasi	100%			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	60 Fasilitasi		17 fasilitasi	5 fasilitasi	100%			
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60 Fasilitasi		8 fasilitasi	9 fasilitasi	100%			
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60 Fasilitasi		17 fasilitasi	18 fasilitasi	100%			
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
	Bidang Administrasi Pemerintahan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah						79	80,93	
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan						1 Inovasi	1 Inovasi	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target						82%	82%	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6 dokumen	6 dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20 laporan	20 laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah						82%	94,95%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						23 orang/bulan	23 orang/bulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan						82%	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 paket	1 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						2 paket	2 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12 paket	12 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						2 paket	2 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						2 dokumen	2 dokumen	
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						1 paket	1 paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 laporan	12 laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Dapat Dicumkupi						82%	100%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						3 Unit	3 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan						82%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya						12 Laporan	12 Laporan	

		Air dan Listrik yang Disediakan							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						82%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						2 Unit	2 Unit
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit	2 Unit
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						6 Unit	6 Unit
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan di Kecamatan Bangsal						90%	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan						550 Pelayanan	550 Pelayanan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan NonPerizinan pada Urusan Pemerintahan						12 Laporan	12 Laporan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti						100%	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa						23 Fasilitasi	21 Fasilitasi
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa						8 Dokumen	6 Dokumen
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						5 Dokumen	5 Dokumen

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5 Dokumen	5 Dokumen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						6 Dokumen	6 Dokumen	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capaian indikator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bangsal

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	
			TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

**Tabel 2.5 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bangsal
Kabupaten Mojokerto**

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKM Kecamatan			78	90	90	91	86,11	89,18	90	91	Baik
2	Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			81%	90%	100%	100%	86,91%	100%	100%	100%	Baik
3	Presentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti			81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			77	79	81	81,5	78,71	80,93	81	81,5	A
5	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			81%	93%	94,95%	95%	93,91%	94,85%	94,95%	95%	Baik
6	Indeks Profesionalitas ASN			78	79	82	82,5	76,96	78,73	82	82,5	Baik
7	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	Baik

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Bangsal diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Bangsal

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Bangsal bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Bangsal yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Bangsal;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Bangsal namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi
 1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata;
 2. Tingginya peluang pasar;
 3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
 4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan.
- Faktor Tantangan Organisasi
 1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana;
 2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan;
 3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat;
 4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan;
 5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
 7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang;
 8. Pelayanan yang Kurang Optimal di Masa Pandemi Covid-19;
 9. Peningkatan Kinerja melalui Inovasi dan Penerapan E-Office.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Bangsal yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Bangsal untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja

utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.6 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.6 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
	Bidang Administrasi Pemerintahan					Bidang Administrasi Pemerintahan					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Bangsal	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81(A)	Rp2.668.150.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Bangsal	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81(A)	Rp2.668.150.000	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	83%	Rp13.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	83%	Rp13.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp8.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Rp5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Rp5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	94,95%	Rp2.305.452.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	94,95%	Rp2.305.452.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Bangsal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	Rp2.305.452.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Bangsal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	Rp2.305.452.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	83%	Rp129.343.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	83%	Rp129.343.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Kec. Bangsal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp11.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp11.600.000	

	Kantor									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp8.895.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp8.895.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp30.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bangsal	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp17.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bangsal	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp17.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Rp3.528.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Rp3.528.000
	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Bangsal	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp30.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Bangsal	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp30.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	Rp28.320.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	Rp28.320.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bangsal	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	83%	Rp143.638.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bangsal	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	83%	Rp143.638.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp63.824.560	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp63.824.560
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp79.813.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp79.813.440
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bangsal	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	83%	Rp76.717.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bangsal	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	83%	Rp76.717.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kec. Bangsal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 Unit	Rp58.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kec. Bangsal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	1 Unit	Rp58.250.000

	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bangsal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp13.105.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bangsal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp13.105.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bangsal	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Hasil yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Rp5.362.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bangsal	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Hasil yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Rp5.362.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Bangsal	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	Rp21.700.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Bangsal	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	Rp21.700.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bangsal	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 Pelayanan	Rp21.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bangsal	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 Pelayanan	Rp21.700.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	Rp21.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bangsal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	Rp21.700.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bangsal	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Rp251.860.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bangsal	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Rp251.860.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bangsal	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4 Fasilitasi	Rp251.860.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bangsal	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4 Fasilitasi	Rp251.860.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	5 Dokumen	Rp37.100.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	5 Dokumen	Rp37.100.000	

	Pemerintahan Desa		Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	Rp39.200.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	Rp39.200.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	Rp59.360.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	Rp59.360.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	Rp116.200.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bangsal	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	Rp116.200.000	
	TOTAL				Rp2.941.710.000	TOTAL				Rp2.941.710.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Bangsal melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Bangsal secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.7 (T-C 32) berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama OPD : Kecamatan Bangsal

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Bangsal ditujukan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	77	78	79	80	81	82

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bangsal Tahun 2024 mengacu pada Tujuan Kecamatan Bangsal yang tertuang pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangsal untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6. Pemeliharaan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bangsal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
	Bidang Administrasi Pemerintahan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	81(A)	Rp2.668.150.000	APBD Kab.		81,5(A)	Rp3.659.952.666
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Kec. Bangsal	1 Inovasi				1 Inovasi	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kec. Bangsal	83%	Rp13.000.000	APBD Kab.		84%	Rp18.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	6 Dokumen	Rp8.000.000	APBD Kab.		6 Dokumen	Rp9.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	7 Laporan	Rp5.000.000	APBD Kab.		7 Laporan	Rp9.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Kec. Bangsal	94,95%	Rp2.305.452.000	APBD Kab.		95%	Rp2.500.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bangsal	22 Orang/Bulan	Rp2.305.452.000	APBD Kab.		22 Orang/Bulan	Rp2.500.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Kec. Bangsal	83%	Rp129.343.000	APBD Kab.		84%	Rp771.052.494
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bangsal	1 Paket	Rp11.600.000	APBD Kab.		1 Paket	Rp43.375.645
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bangsal	1 Paket	Rp8.895.000	APBD Kab.		1 Paket	Rp18.375.645
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bangsal	12 Paket	Rp30.000.000	APBD Kab.		12 Paket	Rp25.000.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bangsal	1 Paket	Rp17.000.000	APBD Kab.		1 Paket	Rp555.050.774
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Bangsal	2 Dokumen	Rp3.528.000	APBD Kab.		2 Dokumen	Rp12.250.430
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Bangsal	1 Paket	Rp30.000.000	APBD Kab.		1 Paket	Rp70.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bangsal	12 Paket	Rp28.320.000	APBD Kab.		12 Paket	Rp47.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Kec. Bangsal	83%	Rp143.638.000	APBD Kab.		84%	Rp54.900.172
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Bangsal	12 Laporan	Rp63.824.560	APBD Kab.		12 Laporan	Rp4.900.172
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bangsal	12 Laporan	Rp79.813.440	APBD Kab.		12 Laporan	Rp50.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Kec. Bangsal	83%	Rp76.717.000	APBD Kab.		84%	Rp316.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Bangsal	1 Unit	Rp58.250.000	APBD Kab.		1 Unit	Rp158.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Bangsal	2 Unit	Rp13.105.000	APBD Kab.		2 Unit	Rp73.000.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Hasil yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Bangsal	10 Unit	Rp5.362.000	APBD Kab.		10 Unit	Rp85.000.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Bangsal	100%	Rp21.700.000	APBD Kab.		100%	Rp65.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Bangsal	600 Pelayanan	Rp21.700.000	APBD Kab.		600 Pelayanan	Rp65.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Bangsal	4 Laporan	Rp21.700.000	APBD Kab.		4 Laporan	Rp65.000.000

	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kec. Bangsal	100%	Rp251.860.000	APBD Kab.		100%	Rp251.860.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Bangsal	4 Fasilitasi	Rp251.860.000	APBD Kab.		4 Fasilitasi	Rp7.519.905.332
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bangsal	5 Dokumen	Rp37.100.000	APBD Kab.		5 Dokumen	Rp37.100.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Bangsal	5 Dokumen	Rp39.200.000	APBD Kab.		5 Dokumen	Rp39.200.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bangsal	5 Dokumen	Rp59.360.000	APBD Kab.		5 Dokumen	Rp59.360.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bangsal	6 Dokumen	Rp116.200.000	APBD Kab.		6 Dokumen	Rp116.200.000
	TOTAL				Rp2.941.710.000				Rp3.724.952.666

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto tahun 2023, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2024
KECAMATAN BANGSAL
KABUPATEN MOJOKERTO

Kode SKPD		7.01.0.00.0.00.04.000												
NAMA SKPD		KECAMATAN BANGSAL												
NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp.)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME				SKPD Terkait	PAGU (Rp)	KL	Rp.	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81(A)	Kec. Bangsal	Rp2.668.150.000	-	0	-	0	-
						Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi							
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		83%	Kec. Bangsal	Rp13.000.000	-	0	-	0	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	Kec. Bangsal	Rp8.000.000					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Laporan	Kec. Bangsal	Rp5.000.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		95%	Kec. Bangsal	Rp2.305.452.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	-		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22 Orang/Bulan	Kec. Bangsal	Rp2.305.452.000					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		83%	Kec. Bangsal	Rp129.343.000					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Kec. Bangsal	Rp11.600.000	-	0	-	0	-

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kec. Bangsal	Rp8.895.000						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kec. Bangsal	Rp30.000.000						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kec. Bangsal	Rp17.000.000	-	0	-	0	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kec. Bangsal	Rp3.528.000						
		Penyediaan Bahan / Material	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kec. Bangsal	Rp30.000.000						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	Kec. Bangsal	Rp28.320.000						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	83%	Kec. Bangsal	Rp143.638.000						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kec. Bangsal	Rp63.824.560						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kec. Bangsal	Rp79.813.440						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	83%	Kec. Bangsal	Rp76.717.000						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kec. Bangsal	Rp58.250.000	-	0	-	0	-	

		Lapangan											
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	Kec. Bangsal	Rp13.105.000					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Hasil yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	Kec. Bangsal	Rp5.362.000					
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	Kec. Bangsal	Rp21.700.000	-	0	-	0	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		600 Pelayanan	Kec. Bangsal	Rp21.700.000					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		4 Laporan	Kec. Bangsal	Rp21.700.000					
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kec. Bangsal	Rp251.860.000					
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		4 Fasilitasi	Kec. Bangsal	Rp251.860.000					
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		5 Dokumen	Kec. Bangsal	Rp37.100.000	-	0	-	0	-

		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 Dokumen	Kec. Bangsal	Rp39.200.000					
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 Dokumen	Kec. Bangsal	Rp59.360.000					
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		6 Dokumen	Kec. Bangsal	Rp116.200.000	-	0	-	0	-
JUMLAH TOTAL								Rp2.941.710.000	-				

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Bangsal Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bangsal, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Bangsal, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Bangsal Tahun 2024 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Perubahan Renstra Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Mojokerto, Desember 2023

CAMAT BANGSAL



LIANTORO SUGENG WIJAYA, S.STP., M.Si

NIP. 19770509 199612 1 001